

Civic Competence Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh

Rafzan¹⁾, Fandy Adpen Lazzavietamsi²⁾, Ahmad Izzul Ito³⁾

¹Universitas Jambi, ² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ³Universitas Bhinneka PGRI janirafzan@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk melihat kompetensi kewarganegaraan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Desain penelitian bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih melalui snowball sampling yang melibatkan guru-guru pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah itu, koordinator kurikulum sekolah dan siswa SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk uji validitas data. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif. Temuan ini mengungkapkan bahwa kompetensi sipil di SMA Negeri 2 Sungai Penuh belum sepenuhnya dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kompetensi kewarganegaraan belum terpenuhi, pertama; Kurangnya minat siswa terhadap investasi diri d dalam proses pembelajaran seperti terlalu enggan terlibat dalam diskusi kelompok dan ketidakmauan untuk menghargai pendapat orang lain, kedua; kurangnya pengetahuan guru dalam memahami karakteristik siswa sehingga guru luput membantu dan sering tidak terkontrol selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga; kurangnya pengetahuan guru dalam memahami potensi siswa yang mengakibatkan metode mengajar guru satu arah.

Keywords: *Civic Competence, Civic Education*

1. PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang dalam menentukan arah pendidikan secara nasional telah difungsikan sebagai sarana menciptakan kemampuan untuk membangun potensi dan cara pandang warganegara agar menjadi manusia yang memiliki keimanan, berakhlak mulia, cakap, kreatif, inovatif dan demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan di atas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan hal yang patut diperhatikan. Perhatian tersebut pemerintah yaitu telah mewajibkan bahwa studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus diberikan di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi (Budimansyah, 2011; Winarno, 2009). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan bisa membentuk kepribadian warganegara yang memiliki rasa nasionalisme dan

patriotisme dalam berbangsa dan bernegara dengan potensi yang mereka miliki baik pengetahuan, keterampilan dan partisipasi sebagai warganegara (Kaelan & Zubaidi, 2010). Di samping itu melalui pendidikan kewarganegaraan siswa diharapkan mampu bertindak sesuai dengan ideologi Pancasila (Kaelan & Zubaidi, 2010). Paparan tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan pendidikan nasional sebagai tujuan dari cita-cita bangsa dan negara dalam aspek pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai rumpun dari ilmu pengetahuan sosial mengacu kepada 4 (empat) kompetensi yaitu; *knowledge, skill, attitude and value, action citizen* (Banks, J., 1985; Keer, 1999; Rozak et al., 2015).

Muatan-muatan dari 4 (empat) kompetensi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel/bagan sebagai berikut:



No	Kompetensi Kewarganegaraan	Ranah Kompetensi Kewarganegaraan Kerja
1	Pengetahuan	<p>Knowledge; merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan reflektif, mereka akan melakukan beberapa hal tertentu. Pertama, mereka akan menyatakan pertanyaan yang jelas dan melalui penelitian yang berkaitan dengan keputusan- masalah mencoba untuk mengkategorikan pengetahuan yang dibutuhkan menjadi sebuah pengetahuan ilmiah. Cara memperolehnya melalui:</p> <p>a. Konsep (<i>concepts</i>) b. Fakta-fakta (<i>facts</i>) b. Generalisasi (<i>generalizations</i>)</p>
2	Kemampuan	<p><i>Civic skill</i>; merupakan ketrampilan dibangun dari berpikir kritis, konsisten dan konsekuen serta dapat bermanfaat dalam membangun diri untuk menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun keterampilan mencakup 4 kategori.</p> <p>a. Kemampuan berpikir (<i>thinking skills</i>)</p>

		<p>b. Kemampuan untuk memperoleh sosial. (<i>social science inquiry skills</i>) c. Kemampuan akademik (<i>academic or study skills</i>). b. Kemampuan group (<i>skills group</i>)</p>
3	Sikap dan nilai	<p><i>Attitude and value</i>; (Nilai dan sikap) dalam pendidikan kewarganegaraan harus mengembangkan satu komitmen menjadi komitmen yang demokratis dan bernilai kemanusiaan (manusiawi). Nilai-nilai yang mencakup adalah:</p> <p>a. Nilai ketuhanan b. Nilai perwujudan diri c. Sikap dan Nilai kebudayaan d. Sikap dan Nilai kebersamaan e. Sikap dan Nilai kesetaraan</p>
4	Tindakan Warga negara	<p><i>Action citizen</i>; Memberikan arahan dalam proses pembelajaran ilmu sosial terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, bahwa kurikulum pembelajaran sosial harus memberi kesempatan siswa dalam hal ini adalah;</p> <p>a. Untuk berpartisipasi dalam proyek dan b. Aktifitas yang mengembangkan diri b. Kepercayaan politik serta</p>

		c. Mengajarkan kemampuan yang bermanfaat
--	--	--

Kompetensi-kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) di atas merupakan pilar utama dalam membentuk siswa yang cerdas, terampil, berguna, berakhlak dan berilmu, yang memiliki kematangan dan kedalaman spritual serta mempunyai tindakan yang reflektif dalam menyelesaikan masalah warganegara (Banks, J., 1985; Budimansyah, 2008a, 2008b). Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) juga digunakan sebagai acuan untuk membentuk warganegara/siswa yang baik (*good citizenship*), bermoral, dan dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, komunitas dan lembaga lainnya (Beny Dwi Lukitoaji & Sapriya, 2015; Branson, Margaret et al., 1994; Komalasari et al., 2008). Berdasarkan paparan di atas maka pembelajaran bidang studi pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) seyogyanya memenuhi empat aspek kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yaitu *knowledge, skill, attitude and value, action citizen*. Untuk mencapai keempat kompetensi ini, maka diharapkan dalam pembelajaran PKn guru hendaknya dapat menerapkan empat aspek kompetensi ini dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh proses pembelajaran yang menerapkan *civic competence* ini masih belum terlaksana (diterapkan) sepenuhnya, kendati demikian di SMA Negeri 2 Sungai Penuh memiliki guru-guru yang latar belakangnya adalah sarjana PKn yang seharusnya dapat melaksanakan *civic competence* itu dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan *civic competence* ini menjadi indikator tercapai atau tidaknya proses belajar mengajar

Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas guru berikutnya yaitu mengembangkan *civic competence* agar siswa-siswa menjadi siswa yang berilmu, bermoral, berakhlak dan berkemampuan serta bertanggung jawab dan demokratis (Banks, J., 1985) (Budimansyah, 2011) (Branson, Margaret, 1994).

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa guru yang mengajar di bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan belum begitu mengembangkan ke empat kompetensi itu, seperti aspek *knowledge, skill, attitude and value serta action citizen*. Salah satu aspek yang menunjukkan belum tercapainya *civic competence* dalam pembelajaran PKn yaitu pada aspek tindakan warganegara (*action citizen*), nilai dan sikap siswa (*attitude and value*). Beberapa kasus yang menunjukkan bahwa masih ada siswa yang belum bisa bertindak sebagai warganegara yang baik (*good citizenship*), dan taat pada norma dan peraturan, seperti; tidak disiplin, bolos sekolah, merokok, buang sampah sembarangan, pakaian tidak rapi, tidak demokratis, kurang kebersamaan dan tidak reflektif, kurang bernegosiasi dan berpartisipasi dengan masyarakat.

Fenomena di atas mendeskripsikan kegiatan proses penanaman kompetensi sebagai warganegara melalui pembelajaran belum terlaksana sebagaimana mestinya. Wujudnya tercapainya proses Pendidikan Kewarganegaraan adalah terbentuknya watak mereka sebagai warganegara melalui peran Pendidikan baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi (Keer, 1999). Sehingga dengan demikian tujuan utama mempersiapkan generasi muda kompetensi kewarganegaraan harus terpenuhi sebagai faktor utama (Keer, 1999). Terpenuhinya tujuan utama kompetensi kewarganegaraan untuk membantu generasi muda (siswa) mengembangkan kemampuan



menyusun informasi, mengambil keputusan, ikut serta dalam urusan politik untuk kepentingan public (Banks, J., 1985; Komalasari & Budimansyah, 2008; LeCompte et al., 2020; Rafzan. et al., 2019).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2005). Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan penerapan Kompetensi Kewarganegaraan baik *knowledge, skill, attitude and value and action citizen*, peneliti harus mendengar informasi dan membuat gambaran berdasarkan keterangan informan (Iskandar, 2008). Informan dalam penelitian ini adalah guru bidang studi PKn, siswa, waka kurikulum dan guru lain yang ikut memberikan gambaran yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011). Teknik pemilihan informan dengan cara snowball sampling. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan metode triangulasi data (Moleong, 2005). analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan guru tentang kompetensi kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengimplementasian kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) dalam pembelajaran PKn, karena sebagai tenaga pengajar, guru berperan langsung dalam memberikan pemahaman dalam mendidik peserta didiknya.

Pandangan guru dalam kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) adalah untuk menggambarkan rincian dari *civic competence* tersebut, mulai dari *civic knowledge, civic skill, civic attitude and value, civic actions*. Pandangan guru mengenai *civic competence* menjelaskan bahwa keempat konsep amat sangat perlu untuk dijadikan tujuan dalam pembelajaran PKn. Karena dengan demikian sehingga siswa memiliki potensi, talenta, dan karakteristik siswa dapat terpenuhi. Guru juga menyatakan bahwa *civic competence* dimulai dari *civic knowledge*, dan *civic knowledge* dimulai dari fakta menuju konsep. Sehingga akan terbangun pengetahuan siswa dalam memperoleh informasi yang benar dan ilmiah yang berkaitan dengan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pengetahuan menurut guru SMA Negeri 2 Sungai Penuh dibangun dengan cara memberikan contoh untuk memahami fakta dan kemudian hal ini memudahkan siswa untuk memahami konsep materi PKn.

Pemahaman guru dalam memahami aspek pengetahuan (*knowladge*) dari *civic competence* dalam pembelajaran PKn di SMA Negeri 2 Sungai Penuh diterapkan melalui pemahaman fakta dari contoh- contoh yang berhubungan dengan konsep yang akan diajarkan.

2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan guru dalam menerapkan kompetensi kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh.

Guru mempunyai peran yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Besarnya pengaruh seorang guru tidak dapat terbantahkan, meskipun dengan kemajuan teknologi, guru tetap diutamakan. Kehadiran seorang guru tidak hanya memberi pembelajaran yang merubah cara berpikir namun terlebih adalah sebagai contoh untuk berbuat dan bertindak.

Teknologi dalam hal ini dapat memudahkan manusia mencari informasi, akan tetapi guru tidak lah dapat tergantikan. Karena guru adalah sebagai sumber belajar, sebagai fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator dan evaluator (Faridah, 2010).

Optimalisasi peran guru tersebut di atas sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) sangat dibutuhkan optimalisasi peran guru ini agar dapat dilakukan dengan peningkatan berkelanjutan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Hanya dengan peningkatan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang berkesinambungan yang dilakukan guru dalam pembelajaran, maka dari itu siswa dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran PKn yang lebih efektif.

Ada beberapa poin penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) dalam pembelajaran PKn, yaitu:

- a. Menyatakan hipotesis yang relevan.
- b. Mengumpul data yang bersangkutan.
- c. Mengevaluasi data (mengatakan apakah itu sah dan dapat di andalkan, menyatakan apakah itu terkait untuk masalah).
- d. Menulis sebuah generalisasi yang tentatif.
- e. Merevisi generalisasi ketika disajikan dengan data tambahan yang terkait dengan masalah.
- f. Kemampuan untuk membuat orang peduli terhadap suatu masalah, dan menghubungi pejabat dalam mengatasi masalah
- g. Kemampuan membuat orang peduli tentang suatu masalah, dan menghubungi pejabat atau pemimpin komunitas terpilih untuk mengatasi masalah (Banks, J., 1985; LeCompte et al., 2020).

Dari poin-poin penting di atas kesemuanya dapat meningkatkan *civic competence* siswa yang sangat perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini guru PKn bertanggung jawab melakukan proses pembelajaran sehingga kompetensi sebagai warganegara terpenuhi. Agar tujuan pembelajaran dalam meningkatkan *civic competence* terwujud, siswa perlu mengembangkan diri untuk lebih kreatif produktif dalam sikap kemandirian, berani mengambil keputusan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap tanggung

jawab sebagai warganegara. Begitupun guru harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dimiliki siswa terutama kompetensi kewarganegaraan agar tercipta peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.

Maka dari itu diperlukan upaya dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Upaya tersebut meliputi langkah- langkah sebagai berikut (Banks, J., 1985; Budimansyah, 2008b; Nusarastriya et al., 2013; Rafzan et al., 2020):

- a. Membuat Latar Belakang Masalah
- b. Mengkonseptualisasi Masalah
- c. Pengumpulan Data

Langkah-langkah tersebut tidak terlepas dari guru dan peserta didik dalam memulai kegiatan pembelajaran secara aktif, efektif, terampil dan disiplin. Kegiatan mereka dapat memperkaya khasanah pengetahuan, memperoleh informasi dan mengolahnya untuk dijadikan bahan kajian mereka dalam sosial dan kemasyarakatan. Adapun kegiatan pembelajaran yang seharusnya dilakukan siswa di SMA Negeri 2 Sungai Penuh untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) harusnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan sebagai driving force mencapai hasil yang baik pada pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn). Maka dengan kegiatan pembelajaran tersebut dapat diikuti dengan pemecahan masalah yang mereka lakukan. Sehingga akan menjadikan siswa lebih kritis, kreatif dan berani dalam mengambil

keputusan menjadi keputusan yang rasional dan bertanggung jawab.

3. Kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran kompetensi kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di SMA Negeri 2 Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Kesiapan Peserta Didik Dalam Pembelajaran

Dari wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan proses pembelajaran PKn dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh adalah kurangnya kemauan dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari kurangnya minat baca peserta didik, mereka lebih senang melakukan kegiatan lain tanpa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. Pada kasus lain dari sisi cara pandang siswa terhadap pelajaran PKn yang menurutnya tidak bermutu, sering menghafal dan pelajarannya sangat umum tidak spesifik. Pada gilirannya mereka lebih senang keluar masuk kelas dan bermain selama proses pembelajaran berlangsung.

2) Kurangnya Pemahaman Guru Tentang Karakteristik Peserta Didik

Guru perlu memahami bahwa peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak memiliki karakteristik yang sama. Dalam satu

kelas terdapat peserta didik yang mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh terlihat bahwa guru belum mampu menentukan karakteristik siswanya. Terdapat ketidakmampuan seorang guru dalam menentukan strategi belajar saat dikelas. Padahal sesungguhnya guru harus mampu memprediksikan siswanya serta menentukan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Guru juga mampu memastikan siswa memperoleh proses pembelajaran yang sama saat berada diruang belajar. Dengan demikian melalui penentuan tersebut guru akan lebih mudah untuk menentukan potensi peserta didiknya. Pengamatan penulis di saat berlangsungnya pembelajaran terlihat guru lebih membiarkan kebiasaan siswa-siswanya ketimbang menegurnya, Guru juga kesulitan dalam memahami siswanya menelisik penyebab terjadinya perilaku peserta didik yang tidak baik ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga merugikan peserta didik lainnya.

Kegagalan guru melihat karakter siswa akan menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh guru yang terlalu fokus dengan materi pembelajaran tapi mengabaikan afektif siswa (Lazzavietamsi, 2020). Di lain hal terdapat banyaknya materi pelajaran PKn sementara waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga guru lebih memfokuskan kepada ketuntasan materi pelajaran.

3) Kurangnya Pemahaman Guru Tentang Potensi Peserta Didik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada SMA Negeri 2 Sungai Penuh terlihat bahwa guru belum mampu mengidentifikasi potensi belajar siswa dan memastikan siswa atau peserta didik dalam mendapat peluang atau kesempatan yang sama untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pengamatan penulis disaat berlangsungnya pembelajaran terlihat guru lebih membiarkan siswa-siswanya ketimbang menegurnya. Guru juga kesulitan dalam memahami faktor terjadinya kelalaian siswa yang dapat membawa siswanya kepada pergaulan yang menyimpang sehingga merugikan peserta didik lainnya.

Dari pernyataan di atas diketahui disebabkan oleh banyaknya materi pelajaran PKn sementara waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga guru lebih memfokuskan kepada ketuntasan materi pelajaran.

Kenyataannya guru kesulitan dalam memahami peserta didik terutama dalam memahami potensi yang dimilikinya, yang lebih dikembangkan oleh guru adalah kemampuan akademik yaitu melalui pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Sementara kemampuan nonakademik sangat jarang guru memahami dan mengapresiasikannya sehingga potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak diperhatikan untuk dapat di kembangkan secara maksimal.

4. KESIMPULAN

Civic competence dalam pembelajaran Pendidikan Kewargaengaraan (PKn) merupakan suatu yang amat penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Melalui *Civic competence* siswa mampu mengimplimentasikan potensi mereka baik pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), nilai dan keterampilan (*value and attitude*), serta partisipasi (*action*). Namun dari hasil penelitian *civic competence* dalam pembelajaran PKn belum terlaksana sepenuhnya di SMA Negeri 2 Sungai Penuh seperti; nilai kewarganegaraan (*civic value*) dan tindakan (*civic actions*). Hal tersebut disebabkan proses pembelajaran dan penilaian masih belum efektif karena masih mengukur dari sisi pengetahuan terkesan mengabaikan afektif dan psikomotor siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) terdapat tiga faktor: *pertama*; kurangnya kemampuan dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran dari membaca materi pelajaran atau mendengarkan penjelasan dari guru, *kedua*; guru selaku pengajar belum mampu memahami karakteristik peserta didik, *ketiga*; kurangnya pemahaman guru tentang potensi peserta didik seperti guru hanya mengembangkan potensi akademik yang dimiliki oleh peserta didik sementara potensi non akademik sering terabaikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J., A. (1985). *Teaching Strategies for The Social Studies. Inquiry, Valuing, and Decision-Making*. Longman.
- Beny Dwi Lukitoaji, & Sapriya. (2015). *Nurturing Civic Competence Of University Students Through Scouting Education As Strengthening Young Generation Character At Muhammadiyah*

University Of Surakarta. *JURNAL CIVICUS*, 19(2), 31–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/civicus.v15i2.2887>

- Branson, Margaret, S. (1994). *Center for Civic Education National Standards for Civics and Government*. Calabasas, CA: Center for Civic Education.
- Branson, Margaret, S., Branson, & S., M. (1994). Center for Civic Education National Standards for Civics and Government. In Calabasas, CA: *Center for Civic Education*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. (2008a). *Inovasi Pembelajaran Project Citizen: Menyemai Warganegara Demokrasi Konstitusional*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- Budimansyah, D. (2008b). Revitalization of Citizenship Education Learning through Project Citizen Practice". *Jurnal Acta Civicus*, 1 (2), 179-198.
- Budimansyah, D. (2011). *Strengthening Citizenship Education To Build The Character of the Nation. In Character Education: Core Values for The Nation's Personality Development Efforts*. (pp. 43–78).
- Faridah. (2010). *Modul PPG Perencanaan Pembelajaran PKn*. UNP.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Gaung Persada Press.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma.
- Keer, D. (1999). *Citizenship Education: an intenational comparison*. National Fondation for Educational Research-NFER.
<https://edudoc.educa.ch/static/xd/2003/59.pdf>



- Komalasari, K., & Budimansyah, D. (2008). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan siswa SMP. *Acta Civicus, 2 Nomor 1*.
- Komalasari, K., Civicus, D. B. J. A., 2008, undefined, & Budimansyah, D. (2008). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan siswa SMP. *Acta Civicus, 2 Nomor 1*. scholar.google.com
- Lazzavietamsi, F. (2020). *Pesantren as Heart Knowledge Management*. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286526>
- LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T. (2020). Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data. *Journal of Social Studies Research, 44(1)*, 127–137. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.03.002>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nusarastraya, Y. H., Sapriya, Wahab, A. A., & Budimansyah, D. (2013). Pengembangan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 3(3)*, 444–449. <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.1631>
- Rafzan., R., Budimansyah, D., Fitriyasi, S., & Adha, M. M. (2019). The Implementation of Higher Order Thinking Using Project Citizen in Escalating Students' Hard and Soft Skills. In E. Setiyawati, W. C. Perdhani, I. Emaliana, R. Febrianti, D. Inayati, S. Sukmawan, I. Puspitasari, & A. Gozali (Eds.), *ICEL Internasional Conference on Advances in Education, Humanities, and Language. Mainstreaming the Influences on Higher Order of Thinking Skill in Humanities, Education and Language in Industrial Revolution 4.0* (pp. 1–805). Universitas Brawijaya Malang. <http://icel.fib.ub.ac.id/proceeding/>
- Rafzan, R., Budimansyah, D., Fitriyasi, S., & Rahmat, R. (2020). Development of Critical Thinking Skills Through the Citizenship Education Course in the Era of. *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*, 418(Acec 2019), 256–261. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200320.050>
- Rozak, A., Budimansyah, D., Sumantri, E., & Winataputra, U. S. (2015). Political thoughts and socio-cultural nationalism ideologies of nurcholish madjid on strengthening democracy, civil societies and civic virtues in Indonesia. *Asian Social Science*. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n27p142>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D (cetakan ke- 14)*. Alfabeta.
- Winarno. (2009). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara.